

Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam



Enhancing the Role of Religious Education in
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Survei Nasional:
Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas

PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia

Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam

**Survei Nasional:
Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas**

PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia

CONVEY REPORT

Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen
Pendidikan Agama Islam

Vol. 1 | No. 9 | Tahun 2018

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis: Rangga Eka Saputra

Peneliti: Yunita Faela Nisa, Laifa Annisa Hendarmin, Erita Narhetali, Debbie Affianty Lubis, Salamah Agung, Tati Rohayati, M. Zaki Mubarak, Agung Priyo Utomo, Rangga Eka Saputra, Bambang Ruswandi, Dwirifqi Kharisma Putra, dan Dirga Maulana

Editor: Endi Aulia Garadian

Tata Letak: Endi Aulia Garadian

Penerbit:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Jl. Kertamukti No.5

Pisangan Barat, Ciputat Timur

Tangerang Selatan, Banten

Telepon: +62-21 7499272, 7423543

Email: ppim@uinjkt.ac.id

Website: ppim.uinjkt.ac.id

KATA PENGANTAR

CONVEY REPORT ini ditulis dalam rangka memberikan gambaran singkat kepada khalayak luas mengenai temuan-temuan riset PPIM UIN Jakarta yang bertajuk *Survei Nasional: Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas*. Survei mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang kondisi sikap dan perilaku keberagaman guru dan dosen saat ini. Hal tersebut penting karena disaat yang bersamaan, sedang terjadi penguatan arus radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di sekolah dan universitas.

Studi tersebut merupakan bagian dari Program CONVEY Indonesia yang digagas oleh PPIM UIN Jakarta bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia. Untuk itu, mewakili para peneliti survei ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan survei ini.

Lebih khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada kepada para peneliti senior PPIM, Prof. Jamhari Makruf, Pak Saiful Umam, Fuad Jabali, Ismatu Ropi, Jajang Jahroni, Ali Munhanif, dan Dadi Darmadi, yang telah mengawal survei ini mulai dari pembuatan instrumen survei, pengambilan data, penulisan laporan, sampai pada diseminasi hasil penelitian. Selanjutnya terima kasih pula kepada Bapak Didin Syafruddin, Din Wahid, dan Ibu Yunita Faela Nisa yang telah membaca dengan teliti dan memberi masukan terhadap naskah CONVEY REPORT ini.

Terakhir, apresiasi mendalam juga saya sampaikan kepada para peneliti yang telah bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama hampir enam bulan untuk riset ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga diberikan kepada para peneliti lokal yang sudah berjuang terutama dalam pengambilan data. Sungguh tidak mudah menjangkau responden di daerah terpencil di negara kepulauan seperti Indonesia. Bahkan ada yang sampai harus menyeberang sungai di pedalaman Kalimantan di mana banyak terdapat buaya. CONVEY REPORT ini ada atas kerja heroik mereka.

Yogyakarta, 23 Maret 2018
Rangga Eka Saputra

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF, 1

REKOMENDASI, 3

LATAR BELAKANG, 5

FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI, 7

LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME GURU DAN DOSEN, 8

FAKTOR PENDORONG RADIKALISME DAN INTOLERANSI, 10

- Persepsi terhadap Tujuan PAI, 10
- Islam sebagai Korban, 12
- Relasi dengan Non-Muslim: Yahudi Adalah Musuh Islam, 13

PELUANG: NKRI YES, JIHAD DENGAN KEKERASAN No.!, 14

FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP RADIKALISME DAN INTOLERANSI, 16

- Jenis Kelamin, 16
- Status Sosial Ekonomi, 17
- Latar Belakang Pesantren, 19
- Induk Kementerian, 20

KEDEKATAN DENGAN ORMAS KEAGAMAAN, 21

- Dukungan terhadap Pembubaran HTI, 21
- Ormas Islam Pilihan, 24
- Ormas Islam yang Tidak Disukai, 24

SUMBER PENGETAHUAN AGAMA, 25

PERSEPSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH, 27

KEPUASAN TERHADAP DEMOKRASI, 30

ISLAMISME, 31

- Dukungan terhadap Penerapan Syariat Islam, 31
- Dukungan terhadap Khilafah, 32

MENG-COUNTER INTOLERANSI DAN RADIKALISME, 33

KESIMPULAN, 35

PROFIL PENULIS, 36

PROFIL LEMBAGA, 36

DAFTAR PUSTAKA, 37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dewasa ini, radikalisme dan intoleransi berbasis agama di Indonesia sedang mengalami penguatan. Kondisi ini ditandai dengan maraknya aksi-aksi diskriminasi terhadap minoritas keagamaan serta semakin lantangnya kelompok-kelompok radikal mendesak agenda-agenda mereka ke dalam ruang publik. Ironisnya, sekolah dan universitas yang merupakan instrumen penting dalam membangun peradaban bangsa, tidak luput dari infiltrasi paham dan gerakan radikalisme. Beberapa studi telah memperlihatkan fakta tersebut. Radikalisme dan intoleransi di dalam institusi pendidikan masuk melalui berbagai cara, di antaranya melalui: kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Rohis (Maarif Institute, 2017; Wahid Foundation, 2016; Salim HS, dkk, 2011), alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal (Masooda, dkk, 2016), dan materi buku ajar PAI yang memuat konten radikal dan eksklusif (PPIM, 2016).

Berangkat dari masalah tersebut, maka peran guru dalam menangkal radikalisme di sekolah dan universitas menjadi sangat krusial. Tentu, dalam proses pembelajaran ada kurikulum, buku ajar, dan pengelola sekolah, namun gurulah yang paling menentukan dalam proses pembelajaran (Clandinin & Connely, 1992). Untuk itu, selain karena mereka yang berinteraksi langsung kepada para siswa dan mahasiswa di kelas, mereka sejatinya adalah pihak yang mempunyai potensi besar untuk menangkal paham dan gerakan radikalisme yang masuk ke sekolah dan universitas.

Namun sayangnya, ada kecenderungan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki pandangan yang cenderung radikal dan eksklusif. Studi yang dilakukan PPIM (2016) telah mengkonfirmasi fenomena ini. Hasilnya, 81% guru PAI tidak setuju untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah Agama lain di wilayahnya. Sebanyak 74% mereka menolak memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Selain itu, 80% tidak bersedia jika diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya. Temuan riset ini memberikan gambaran bahwa pandangan keagamaan guru-guru PAI berpotensi mengancam keragaman bangsa Indonesia yang plural.

Berangkat dari kondisi di atas, survei ini mengkaji sikap dan perilaku keberagaman guru dan dosen PAI serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi ini bertujuan melihat tingkat radikalisme dan intoleransi mereka secara mendalam dan komprehensif termasuk faktor demografi (jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan pesantren, dan induk kementerian), kedekatan dengan ormas, Islamisme, dan kinerja pemerintah. Pengambilan data dilakukan pada 1 September sampai 7 Oktober 2017 di 34 provinsi di

Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 322 guru dan dosen, yang terdiri dari 264 guru dan 58 dosen.

Survey ini mengkaji dua variabel yaitu opini/sikap dan aksi/perilaku keberagamaan guru dan dosen dengan melihat tingkat radikalisme dan intoleransi mereka. Pada level sikap, hasil survei memperlihatkan mayoritas guru dan dosen memiliki sikap keberagamaan yang moderat (52,5%) dan toleran (45,3% toleransi eksternal atau terhadap umat agama lain, dan 54% toleransi internal atau terhadap penganut aliran atau kelompok yang berbeda di dalam internal umat Islam). Sama halnya dengan level sikap, pada level tindakan, mereka juga cenderung memiliki perilaku yang cenderung moderat (74,2%) dan toleran secara internal (61,5%).

Namun, jika dilihat dari perilaku toleransi internal, para guru dan dosen tampak intoleran (69,3%). Tingkat intoleransi internal yang tinggi tersebut berkorelasi dengan penolakan atau stigma negatif mereka terhadap kelompok aliran yang menyimpang atau sesat di dalam umat Islam, terutama kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah. Data menunjukkan sebanyak 87,89% guru dan dosen menyatakan setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Ada tiga faktor yang mendorong radikalisme dan intoleransi di kalangan guru dan dosen. *Pertama*, persepsi terhadap tujuan PAI. Jika dipisah antara sikap guru dan dosen, persepsi guru lebih intoleran. Mereka cenderung tidak setuju jika tujuan PAI membentuk siswa untuk toleran dan berbuat baik kepada penganut Syiah (54,70) dan Ahmadiyah (53,60%). Sementara dosen lebih dapat menerima pendapat bahwa tujuan PAI juga harus mengakomodasi nilai toleransi terhadap penganut Syiah dan Ahmadiyah. Sebanyak 28,10% yang menyatakan sangat tidak setuju jika tujuan PAI adalah membentuk siswa untuk toleran dan berbuat baik kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah. Rendahnya toleransi terhadap minoritas keagamaan sejalan dengan hasil survei, bahwa mayoritas guru dan dosen berpendapat bahwa materi PAI yang diberikan semakin menambah keimanan dan ketaqwaan siswa dan mahasiswa (96,60% guru dan 91,20% dosen). Artinya bagi mereka pengajaran dan penanaman nilai-nilai toleransi bukan prioritas pembelajaran PAI.

Kedua, perasaan Islam sebagai korban. Mayoritas guru dan dosen merasa umat Islam saat ini dalam kondisi terzalimi (62,11%). Berangkat dari persepsi itu, mereka cenderung menyalahkan non-Muslim atas kondisi tersebut. Mereka berpendapat bahwa secara ekonomi, non-Muslim lebih diuntungkan (54,35%). Selain itu, 40,06% meyakini kalau orang non-Muslim bertanggung jawab atas ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. *Ketiga*, pandangan bahwa Yahudi adalah

musuh Islam. Temuan ini penting untuk melihat persepsi mereka dalam konteks relasi dengan non-Muslim. Sebagian besar mereka setuju bahwa orang Yahudi adalah musuh Islam (57,76%) dan membenci Islam (63,66%). Sebanyak 66,15% menyatakan bahwa orang Kristen tidak membenci Muslim. Survei ini menegaskan bahwa guru dan dosen intoleran secara eksternal terhadap Yahudi, dan intoleran secara internal terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Terakhir, walaupun guru dan dosen memiliki sikap atau perilaku yang cenderung intoleran, namun temuan survei ini juga memperlihatkan bahwa loyalitas mereka terhadap negara Indonesia (NKRI, Pancasila, dan UUD1945) dan demokrasi sangat tinggi. Sebanyak 91,93% menyatakan tidak setuju jika pemerintah Indonesia disebut kafir atau *thaghut*, dan 88,82% menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Selain itu, mayoritas guru (51,30%) dan dosen (73,70%) setuju jika PAI mengajarkan agama-agama lain. Data yang terakhir itu cukup menggembirakan karena sebenarnya terbuka peluang untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebangsaan mereka. Untuk itu, penguatan nilai-nilai keberagaman guru dan dosen, serta mengembangkan model pembelajaran yang mengajarkan agama-agama lain penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

REKOMENDASI

1. Pengenalan studi-studi agama dan kepercayaan perlu diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam. Terkait materi, dalam pengajaran PAI, perlu mengembangkan literasi keberagaman (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*).
2. Reformasi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Guru Agama Islam. Pemerintah membuka peluang lebih besar pada guru-guru untuk mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan dalam sebuah program yang sistematis. Pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas guru dan dosen dalam menyampaikan materi toleransi dan keberagaman. Tujuan dari pelatihan juga untuk menumbuhkan kesadaran guru bahwa tujuan PAI selain membentuk siswa yang taat, juga mencetak menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, yang paham dan mengamalkan nilai-nilai kewargaan –toleransi, keberagaman,

dan kebebasan –dan kebangsaan –NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi.

3. Negara berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif. Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertegas dan memperdalam materi toleransi dalam buku ajar PAI yang menjadi pegangan guru dan dosen. Selain itu untuk memastikan buku ajar PAI tidak terinfiltrasi ideologi radikalisme dan intoleransi, dibutuhkan lajnah pentashih buku ajar PAI. Institusi ini memiliki otoritas untuk mengawasi proses pembuatan dan penerbitan buku PAI. Tujuannya untuk memastikan bahwa buku ajar PAI bebas dari muatan radikal dan intoleran, serta sejalan dengan nilai-nilai kewargaan (*civic values*) dan kebangsaan.
4. Usaha-usaha di atas dilakukan bersamaan dengan upaya negara mendukung paham Islam moderat dalam masyarakat Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk bekerja terus menerus dalam penyebarluasan paham mereka yang dapat menangkal argumen-argumen pendukung paham intoleran dan radikal dalam masyarakat.

LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dianggap sebagai contoh ideal dari keselarasan antara Islam, demokrasi, dan modernitas.¹ Selain itu, Indonesia juga dinilai sebagai negara yang damai dan toleran. Salah satu elemen vital dari umat Islam Indonesia dalam mendukung nilai-nilai toleransi dan sistem demokrasi adalah dukungan masyarakat sipil Islam – terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui lembaga pendidikan yang mereka miliki, umumnya berbentuk pesantren dan madrasah, penyebaran ajaran Islam yang toleran dan moderat diajarkan kepada masyarakat Islam.² Dalam perkembangannya, pendidikan agama tidak hanya diajarkan di pesantren dan madrasah, tapi juga di sekolah umum. Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Untuk itu, pendidikan agama di sekolah tentulah berpengaruh besar mewarnai wajah keberagaman di Indonesia.

Namun setidaknya dalam dua dekade terakhir, gerakan radikalisme dan ekstremisme mengikuti terbukanya ruang kebebasan di era demokrasi. Ironisnya, infiltrasi gerakan radikal juga menyasar institusi pendidikan formal sekolah dan universitas. Paham-paham radikal dan intoleran masuk ke dalam sekolah dan universitas masuk melalui beberapa celah, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, konten di dalam buku ajar PAI, dan alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal.³ Sayangnya, berdasarkan studi

¹Lihat Robert W. Hefner (2000). "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia." Princeton: Princeton University Press; Saiful Mujani (2007). "Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; R. William Liddle (ed.) (2011). "Crafting Indonesian Democracy: Internasional Conference Toward Structural Reforms for Democratization Indonesia." Jakarta: Penerbit Mizan.

² Azyumardi Azra, dkk (2010). "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia" dalam Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman (ed.) "Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education". Princeton: Princeton University Press.

³ Lihat Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri."; Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM; PPIM UIN Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah."; Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI). Sedangkan studi tentang radikalisme di kampus, lihat M. Zaki Mubarak (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.

PPIM (2016) ada kecenderungan guru-guru PAI memiliki pandangan keagamaan yang radikal dan eksklusif.⁴

Padahal guru PAI seharusnya menjadi salah satu instrumen penting bangsa dalam menyebarkan toleransi, menangkal radikalisme, dan memperkuat pemahaman kebangsaan bagi generasi muda. Dengan pemahaman yang inklusif, moderat, dan toleran, guru dan dosen PAI diharapkan dapat menjadi apa yang disebut Scott Appleby sebagai *nonviolent religious militant*⁵ yang senantiasa menebarkan ajaran agama secara damai dan toleran kepada para siswa di sekolah dan di tengah masyarakat Indonesia yang secara kodrati plural. Oleh karenanya, mengetahui lebih jauh pandangan keberagaman guru dan dosen PAI secara lebih komprehensif, merupakan sesuatu yang penting saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, studi ini mengkaji sikap dan perilaku keberagaman guru dan dosen Pendidikan Agama Islam. Dengan melalui survei skala nasional, studi ini mengkaji faktor-faktor yang berperan mempengaruhi sikap dan perilaku keberagaman guru dan dosen secara komprehensif. Beberapa variabel yang digunakan untuk melihat radikalisme dan intoleransi meliputi: faktor demografi, model pembelajaran PAI, kedekatan dengan ormas Islam, persepsi terhadap pemerintah, dan Islamisme.

Selain mengkaji faktor-faktor pendorong radikalisme dan intoleransi di kalangan guru dan dosen, survei ini juga mengkaji peluang dan potensi dari guru dan dosen dalam mengembangkan model pembelajaran PAI yang dapat mendorong dan memperkuat toleransi dan moderasi siswa dan mahasiswa. Hal ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam menangkal radikalisme dan intoleransi di sekolah melalui guru dan dosen PAI.

⁴ Lihat PPIM UIN Jakarta (2016). "Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." Laporan hasil penelitian.

⁵ *Nonviolent religious militant* yaitu istilah yang ditujukan kepada para pemuka agama yang terinspirasi oleh ajaran agama mereka dalam menyelesaikan konflik secara damai. Dengan otoritas keagamaannya, mereka melakukan usaha-usaha perdamaian dengan menggunakan sumber-sumber ajaran agama seperti pemaafan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, serta cinta kasih. Lihat: R. Scott Appleby, S. R. (1999). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.

FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode survei yang dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Dari setiap provinsi diambil sampel masing-masing satu kabupaten dan kota. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 September sampai 7 Oktober 2017 secara serentak di seluruh wilayah studi.

Sampel diambil dari populasi guru PAI pada tingkat Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan guru mata pelajaran Aqidah/Fiqih tingkat Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan sampel untuk dosen, diambil dari dosen PAI di perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) dan dosen Studi Keislaman di bawah Kemenag.

Sampel yang digunakan sebanyak 322 guru dan dosen –264 guru dan 58 dosen –dari total populasi sebesar 684.752 orang⁶, dengan Margin of Error (MoE) sebesar $\pm 2,3\%$. Metode penarikan sampel yaitu *Multistage Sampling (Three Stage Stratified Sampling)* dengan strata kabupaten dan kota. Dalam menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 5% dari sampel. Mekanisme secara teknis adalah jika sampel di sebuah kabupaten/kota sebanyak 1-4 sekolah, maka *spot check* dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan survei di satu sekolah yang terkena sampel. Jika sampel sekolah sebanyak 5-10 dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 sekolah yang terkena sampel. Terakhir jika sampel dalam satu kabupaten/lebih dari 10 kota, maka *spot check* dilakukan di 3 sekolah sampel.

Dua variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat keberagaman adalah radikalisme dan toleransi. Kedua variabel tersebut dibagi dua level yaitu sikap/opini dan perilaku/aksi. Selanjutnya, khusus untuk variabel intoleransi dibagi lagi menjadi intoleransi eksternal dan internal. Dari klasifikasi tersebut maka didapat enam independen variabel: radikalisme opini (RADOP), radikalisme aksi (RADAC), toleransi eksternal opini (TEOP), toleransi eksternal aksi

⁶ Proporsi populasi dosen di bawah Kemenristek Dikti sebesar 521.951, sedangkan Kemenag sebanyak 162.801.

(TEAC), toleransi internal opini (TIOP), dan toleransi internal aksi (TIAC). Skor intoleransi diukur berdasarkan kategori: sangat intoleran, intoleran, netral, toleran, dan sangat toleran. Sedangkan radikalisme diukur dengan kategori: sangat radikal, radikal, netral, moderat, dan sangat moderat.

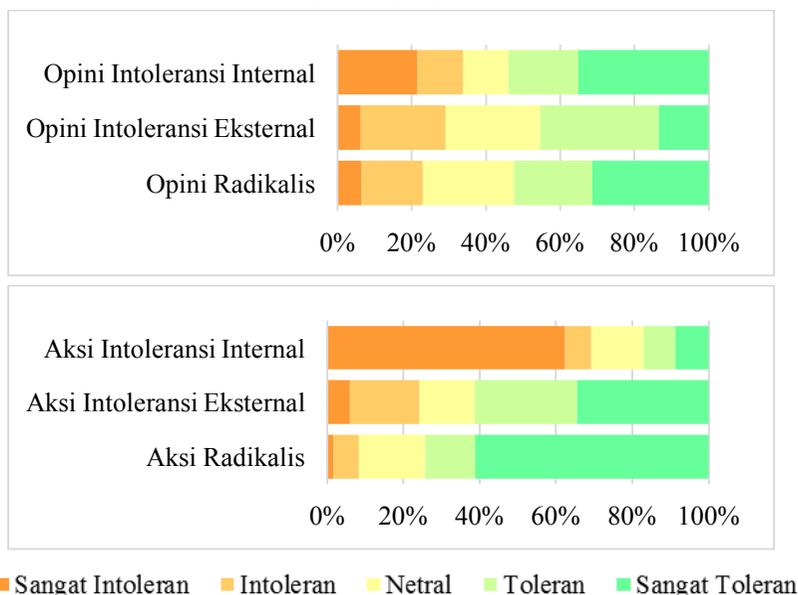
LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME GURU DAN DOSEN

Data survei ini memperlihatkan bahwa sebagian besar guru dan dosen cenderung memiliki sikap/opini keberagamaan yang toleran dan moderat (52,5%). Pada level toleransi, data memperlihatkan bahwa mereka cenderung toleran baik secara eksternal atau terhadap pemeluk agama lain (45,3%), maupun terhadap perbedaan di dalam internal umat Islam (54%). Begitu pun jika dilihat dari aspek aksi/perilaku, mayoritas mereka memiliki perilaku keberagamaan yang cenderung moderat (74,2%) dan toleran secara eksternal (61,5%).

Namun jika dilihat secara perilaku intoleransi internal, mereka memiliki kecenderungan besar memiliki perilaku intoleran (69,3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan mereka berperilaku intoleran terhadap orang atau kelompok yang berbeda sesama Muslim. Perilaku intoleransi internal itu terutama jika diasosiasikan dengan penganut aliran yang dianggap menyimpang di dalam Islam, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa para guru dan dosen memiliki kecenderungan lebih toleran dan moderat terhadap non-Muslim daripada sesama Muslim yang dianggap menyimpang atau sesat. Sebanyak 87,89% guru dan dosen menyatakan setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Gambar 1. Proporsi guru dan dosen menurut kategori opini dan aksi intoleransi internal, intoleransi eksternal, dan radikalisme



Lebih jauh, berdasarkan data di atas, penting untuk melihat sebaran proporsi pada setiap tingkatan intoleransi internal ditinjau dari induk kementerian di mana guru dan dosen bernaung. Survei menemukan bahwa mereka yang berada di bawah Kemenag memiliki proporsi lebih intoleran secara internal dibandingkan mereka yang berada di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti.

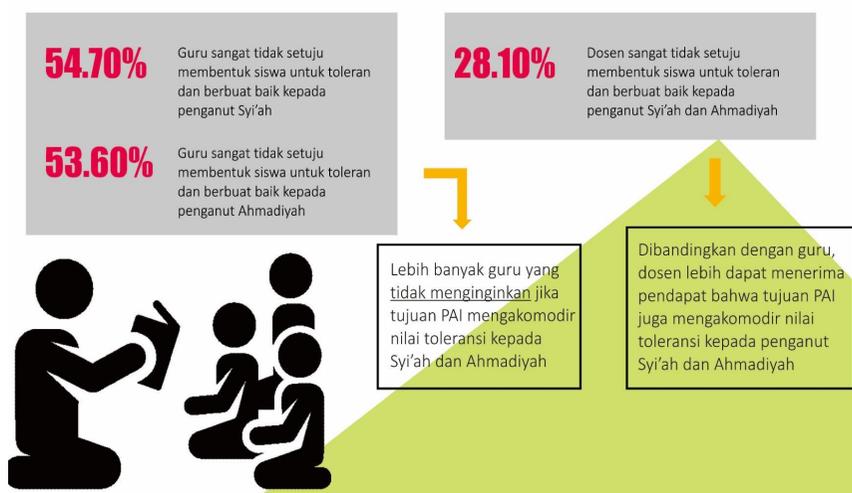
Uji hipotesis terhadap korelasi antara asal induk kementerian dengan tingkat intoleransi internal menunjukkan hasil tingkat signifikansi sebesar 5%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asal induk kementerian dengan kategori sikap intoleransi internal. Berdasarkan data yang sama juga dapat dilihat besarnya rasio kecenderungan (*odds ratio*) bahwa guru/dosen yang berada di bawah Kemenag memiliki kecenderungan lebih tinggi sebesar 2,47 kali dibandingkan mereka yang berada di bawah induk kementerian lainnya untuk memiliki sikap yang intoleran secara internal.

FAKTOR PEMICU RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Persepsi terhadap Tujuan PAI. Persepsi guru/dosen terhadap tujuan PAI menjadi isu yang krusial mengingat pandangan mereka sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap keberagaman siswa/mahasiswa di dalam kelas. Hasil survei ini menunjukkan sebagian besar guru tidak menginginkan jika tujuan PAI mengakomodasi nilai toleransi kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah. Mereka cenderung sangat tidak setuju jika tujuan PAI adalah membentuk siswa untuk toleran dan berbuat baik kepada penganut Syiah (54,70%) dan Ahmadiyah (53,60%).

Namun, dibandingkan dengan guru, dosen lebih dapat menerima pendapat bahwa tujuan PAI juga harus mengakomodasi nilai toleransi terhadap penganut Syiah dan Ahmadiyah. Hanya 28,10% dosen yang menyatakan sangat tidak setuju jika tujuan PAI adalah membentuk siswa untuk toleran dan berbuat baik kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah. Jumlah ini cukup jauh jika dibandingkan dengan guru yang menyatakan tidak setuju dengan tujuan PAI tersebut, yaitu rata-rata di atas 50%.

Gambar 2. Persepsi guru dan dosen terhadap tujuan PAI dalam membentuk siswa dan mahasiswa untuk berbuat baik kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah



Lantas, apa yang ada di benak guru/dosen tentang tujuan PAI? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dilihat dari persepsi guru terhadap apa yang mereka harapkan kepada para siswa/mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran PAI. Sebagian besar guru dan dosen berpendapat bahwa materi PAI yang diberikan semakin menambah keimanan dan ketaqwaan siswa/mahasiswa (96,60% guru dan 91,20% dosen). Mereka yang menyatakan pembelajaran PAI mengurangi keimanan dan ketaqwaan siswa/dan mahasiswa hanya 1,10% untuk guru, dan 0% untuk dosen. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa PAI tidak berpengaruh terhadap keimanan dan ketaqwaan siswa/mahasiswa sebesar 1,50% untuk guru dan 7% untuk dosen.

Gambar 3. Persepsi guru dan dosen terhadap hasil pengajaran PAI yang didapatkan oleh siswa dan mahasiswa



Data ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap tujuan pembelajaran PAI adalah berpusat pada aspek penguatan keimanan dan ketaqwaan siswa/mahasiswa. Persepsi terhadap penguatan nilai-nilai toleransi dan keberagaman tampak tidak menjadi prioritas utama mereka dalam tujuan pembelajaran PAI. Data ini juga sejalan dengan persepsi siswa terkait materi PAI apa yang paling banyak mereka terima. Sebagian besar mereka menyatakan bahwa aspek keimanan, ketaqwaan, dan ibadah merupakan porsi yang paling besar mereka terima dari materi PAI (63,47%). Temuan ini bisa jadi merupakan dampak dari masih

sedikitnya porsi materi dalam PAI yang menekankan pada penguatan toleransi dan keberagaman.⁷

Islam sebagai Korban. Persepsi bahwa umat Islam saat ini dalam kondisi terzalimi menjadi salah satu pemicu radikalisme dan intoleransi guru dan dosen. Sebanyak 62,11% mereka setuju dengan pendapat bahwa umat Islam saat ini dalam kondisi terzalimi. Kondisi ini berpotensi membawa kepada sikap bahwa yang disalahkan dari situasi ini merupakan non-Muslim. Sehingga peluang memunculkan sikap kebencian kepada non-Muslim menjadi semakin besar.

Berangkat dari perasaan terzalimi itu, hasil temuan survei juga memperlihatkan pandangan guru dan dosen yang menyalahkan non-Muslim atas kondisi yang mereka rasakan. Mereka menyatakan bahwa secara ekonomi, orang non-Muslim lebih diuntungkan dibandingkan umat Islam (54,35%). Kemudian, sebanyak 40,06% percaya kalau orang non-Muslim bertanggung jawab atas ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.

Gambar 4. Persepsi guru dan dosen Islam sebagai korban

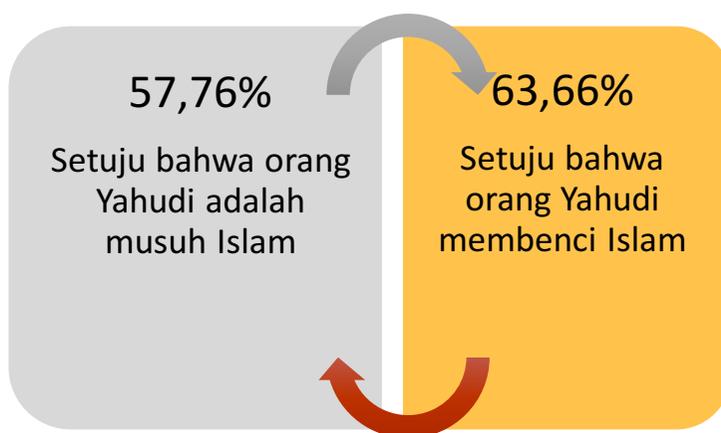


⁷ Lihat PPIM UIN Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah." Laporan hasil penelitian.

Relasi dengan Non-Muslim: Yahudi adalah Musuh Islam. Untuk melihat tingkat radikalisme dan intoleransi guru dan dosen penting untuk melihat pandangan mereka terkait isu-isu hubungan dengan non-Muslim. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa mereka bisa menerima keberadaan agama lain, khususnya Kristen. 66,15% guru dan dosen menyatakan bahwa orang Kristen tidak membenci Muslim, dan sebanyak 64,60% dari mereka tidak keberatan jika mereka yang berbeda agama memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Islam. Selain itu, mereka juga tidak merasa tidak keberatan jika mereka yang berbeda agama memberi bantuan kepada lembaga-lembaga Islam (64,60%).

Jika penerimaan mereka terhadap umat Kristen cenderung cukup tinggi, namun hal itu tidak berlaku untuk Yahudi. Persepsi negatif terhadap Yahudi inilah yang menjadi salah satu memicu sikap intoleransi dan radikalisme mereka. Sebanyak 57,76% guru dan dosen setuju bahwa orang Yahudi adalah musuh Muslim. Sedangkan sebanyak 63,66% setuju bahwa orang Yahudi membenci Islam. Persepsi negatif tersebut tampak dipengaruhi oleh konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, dan beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, gambaran negatif Yahudi juga disajikan dalam buku ajar PAI.

Gambar 5. Persepsi guru dan dosen terhadap Yahudi

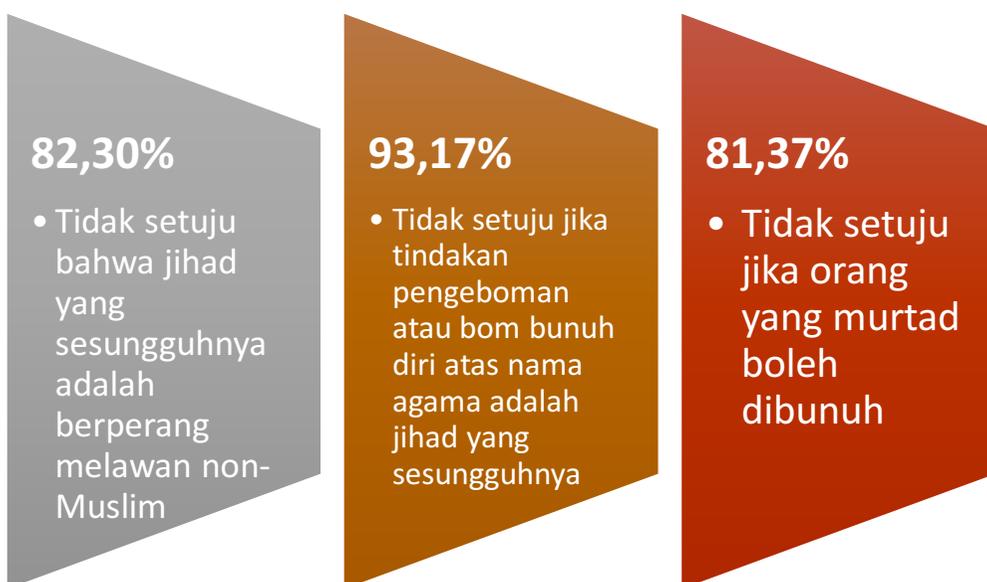


PELUANG: NKRI YES, JIHAD DENGAN KEKERASAN NO!

Di atas sudah dipaparkan fenomena kecenderungan dan faktor pemicu menguatnya radikalisme dan intoleransi di kalangan guru dan dosen. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil survei yang memperlihatkan sikap dan perilaku keberagamaan guru dan dosen yang mendukung toleransi, demokrasi, dan konsep-konsep dasar negara Indonesia –Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

Pertama, terkait dengan isu jihad. Mayoritas mereka menolak jika jihad dipahami sebagai perang melawan non-Muslim (82,30%). Selain itu, mereka juga menolak terhadap aksi-aksi kekerasan terhadap non-Muslim atas nama jihad. Hal itu dapat dilihat dari data, bahwa sebanyak 93,17% guru dan dosen tidak setuju jika tindakan pengeboman atau bom bunuh diri atas nama agama adalah Jihad yang sesungguhnya. Lebih jauh, mereka juga tidak setuju jika orang yang murtad boleh dibunuh (81,37%).

Gambar 6. Persepsi tentang Jihad

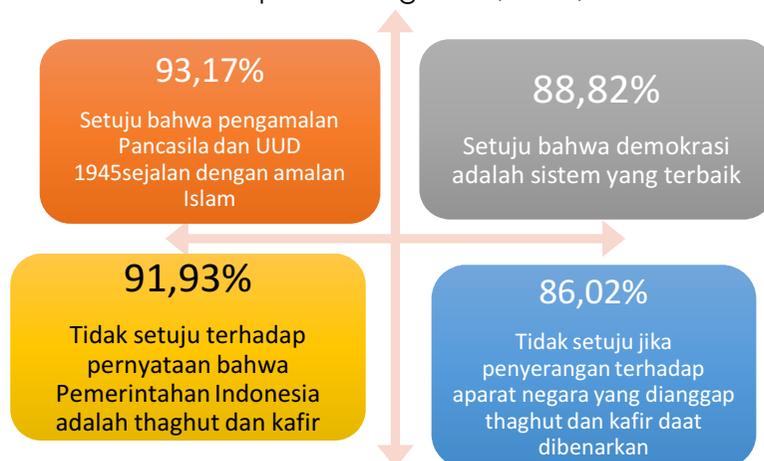


Kedua, terkait dengan dukungan terhadap Islam, NKRI, dan demokrasi. Penerimaan guru dan dosen terhadap Pancasila, NKRI, dan demokrasi masih sangat tinggi. Sebanyak 93,17% mereka setuju bahwa pengamalan Pancasila dan UUD 1945 adalah sejalan dengan amalan Islam. Sejalan dengan itu, penolakan mereka terhadap anggapan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah *thaghut* dan kafir juga sangat besar. Hal tersebut dapat dari data, bahwa sebanyak 91,93% tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah *thaghut* dan kafir. Selain itu, sebanyak 86,02% juga tidak setuju jika penyerangan terhadap aparat negara yang dianggap *thaghut* dan kafir dapat dibenarkan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mereka tidak mempertentangkan antara syariat Islam dengan Pancasila dan UUD 1945. Tingginya dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam, sekaligus terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat dimaknai juga sebagai penerimaan mereka secara prinsip kepada ideologi bangsa.

Dukungan demokrasi sebagai sistem terbaik juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 88,82%. Hasil ini patut disyukuri di tengah tingginya perasaan bahwa umat Islam dalam kondisi terzalimi –sebagai dijelaskan sebelumnya. Selain itu, di tengah isu-isu sosial keagamaan yang berkembang saat ini, seperti pengesahan Perpu Ormas oleh pemerintah dan kasus penodaan agama yang mengiringi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dukungan terhadap NKRI dan demokrasi masih cukup tinggi.

Gambar 7. Persepsi tentang Islam, NKRI, dan Demokrasi



FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP LEVEL RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Jenis Kelamin. Dari sisi demografi berdasarkan jenis kelamin, guru/dosen baik laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki sikap dan perilaku keberagamaan yang moderat. Fakta ini menjadi angin segar mengingat guru/dosen PAI adalah salah satu unsur penting dalam membentuk sikap dan perilaku keberagamaan siswa/mahasiswa di kelas. Pada level sikap keberagamaan, 44,7% guru/dosen perempuan memiliki sikap keberagamaan yang moderat. Sedangkan laki-laki sebanyak 56,8%. Namun, walaupun pandangan keagamaan mereka baik perempuan maupun laki-laki cenderung moderat, tapi persentase dari mereka yang memiliki pandangan yang radikal juga bisa dikatakan cukup tinggi –Perempuan (29%) dan laki-laki (19,7%).

Lebih jauh, pada level perilaku, guru/dosen juga lebih moderat dibandingkan dengan pada level sikap mereka. Sebanyak 74,6% guru/dosen perempuan memiliki perilaku keberagamaan yang moderat, dan laki-laki sebesar 74,1%. Sedangkan mereka yang berperilaku radikal sebesar 9,1% bagi perempuan, dan 7% untuk laki-laki. Dari jumlah persentase tersebut, dapat dinyatakan bahwa antara guru/dosen perempuan dan laki-laki memiliki tingkat perilaku moderat yang seimbang.

Pada sikap toleransi internal, mereka juga cenderung memiliki sikap yang toleran, yaitu sebesar 62,23% untuk perempuan dan 49,5% untuk laki-laki. Walaupun demikian mereka yang memiliki sikap intoleran juga cukup tinggi yaitu 38,9% untuk perempuan, dan 24,6% untuk laki-laki. Sedangkan, pada level perilaku, mereka cenderung sangat intoleran. Guru/dosen laki-laki yang paling tinggi perilaku intoleransinya, yaitu sebesar 74,5% dibanding yang perempuan dengan persentase 59,6%.

Tabel 1. Level radikalisme dan intoleransi pada kategori demografi jenis kelamin

JENIS KELAMIN		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
<i>RADOP</i>				
Guru/Dosen <i>p=0,123</i>	Perempuan	29	26.3	44.7
	Laki-Laki	19.7	23.6	56.8
<i>RADAC</i>				
Guru/Dosen <i>p=0,930</i>	Perempuan	7	18.4	74.6
	Laki-Laki	9.1	16.8	78.6

JENIS KELAMIN		Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>
		<i>TEOP (%)</i>				<i>TEAC (%)</i>			
Guru/Dosen	Perempuan	23.7	24.6	51.8	0.064	25.5	11.4	63.1	0.536
	Laki-Laki	32.2	26	41.8		23.5	15.9	60.6	
		<i>TIOP (%)</i>				<i>TIAC (%)</i>			
Guru/Dosen	Perempuan	24.6	13.2	62.3	0.044	59.6	13.2	27.2	0.006
	Laki-Laki	38.9	11.5	49.5		74.5	13.9	11.5	

Status Sosial Ekonomi. Berdasarkan status sosial ekonomi, sikap dan perilaku guru/dosen cenderung moderat. Ada korelasi positif antara status sosial ekonomi dengan tingkat moderasi guru/dosen. Mereka yang berpenghasilan di atas 7,5 juta paling tinggi tingkat moderasinya, baik pada level sikap (77.7%) maupun perilaku (94.7%), jika dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan di bawahnya. Secara umum guru/dosen yang mempunyai penghasilan lebih tinggi cenderung mempunyai sikap dan perilaku keagamaan yang moderat ketimbang yang berpenghasilan lebih rendah, begitu pun terjadi pada sikap dan perilaku radikal mereka.

Walaupun pada level sikap, guru/dosen cenderung moderat, namun persentase sikap keberagamaan mereka yang radikal juga bisa dikatakan masih cukup tinggi, yaitu antara 12% yang paling rendah dan 28.8% yang paling tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi radikalisme masih cukup kuat di kalangan guru/dosen. Sikap radikalisme yang demikian sangat berpotensi menjadi perilaku radikal jika tidak ada penanganan yang masif dan sistematis. Data menunjukkan bahwa semakin sejahtera guru/dosen maka mereka semakin moderat. Begitu pun sebaliknya, semakin tidak sejahtera mereka maka akan semakin radikal.

Sedangkan pada sikap intoleransi internal, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung lebih intoleran. Walaupun pada kelompok penghasilan 7,5 juta tidak lebih intoleran dari kelompok penghasilan 5 sampai 7,5 juta, tapi kelompok yang disebutkan terakhir ini lebih intoleran (46.6%) daripada kelompok status sosial ekonomi di bawahnya.

Guru/dosen cenderung memiliki perilaku yang intoleran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda di dalam Islam. Guru yang paling intoleran terdapat pada kelompok pendapatan 5 sampai 7,5 juta sebesar 76.6%. Sementara yang tingkat intoleransinya paling rendah adalah pada kelompok pendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 56,2%. Demikian jika dilihat dari sisi toleransinya, guru yang berpenghasilan kurang dari 1 juta (28,7%) adalah yang paling toleran dibandingkan dengan kelompok status sosial ekonomi di atas mereka. Termasuk yang berpendapatan lebih dari 7,5 juta adalah yang paling rendah tingkat toleransinya (17,1%).

Tabel 2. Level radikalisme dan intoleransi pada kategori demografi status sosial ekonomi

STATUS SOSIAL EKONOMI				
<i>RADOP</i>		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
Guru/Dosen <i>p=0,093</i>	<1 Jt	28.8	24.7	46.6
	1 - 2.5 Jt	26.8	26.7	46.5
	2.5 - 5 Jt	17	27	56
	5 - 7.5 Jt	23.4	17	60
	>7.5 Jt	12	11	77.7
<i>RADAC</i>				
Guru/Dosen <i>p=0,188</i>	<1 Jt	10.9	24.7	64.4
	1 - 2.5 Jt	6.9	16.8	76.3
	2.5 - 5 Jt	10	15	75
	5 - 7.5 Jt	3	20	76.7
	>7.5 Jt	6	0	94.7
	>7.5 Jt	6	0	94.7

STATUS SOSIAL EKONOMI		Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>
		TEOP (%)				TEAC (%)			
Guru/Dosen	<1 Jt	20.5	27.4	52	0.322	19.2	11	69.9	0.348
	1 - 2.5 Jt	25.8	25.7	48.6		21.9	15.8	62.4	
	2.5 - 5 Jt	34	22	44		26	14	60	
	5 - 7.5 Jt	40	33	26.7		40	17	43.3	
	>7.5 Jt	39	22	38.8		22.3	16.7	61.1	
		TIOP (%)				TIAC (%)			
Guru/Dosen	<1 Jt	24.7	20.5	54.8	0.014	56.2	15.10	28.7	0.543
	1 - 2.5 Jt	31.9	6.9	61.4		69.9	13.9	15.8	
	2.5 - 5 Jt	35	13	52		75	13	12	
	5 - 7.5 Jt	46.6	7	46.7		76.6	13	10	
	>7.5 Jt	39	22	38.8		72	11	17.1	

Latar Belakang Pesantren. Temuan survei memperlihatkan bahwa guru/dosen yang pernah mendapatkan pendidikan di pesantren cenderung lebih moderat ketimbang mereka yang tidak pernah mendapatkan pendidikan di pesantren. Meskipun demikian selisihnya cukup kecil (sekitar 2-3%). 53,3% mereka yang moderat adalah pernah mendapat pendidikan di pesantren, dan 51,4% mereka yang tidak pernah belajar di pesantren. Dari sisi tindakan pun memperlihatkan pola yang sama. 75,3% mereka yang pernah belajar di pesantren memiliki perilaku keberagaman yang moderat, ketimbang mereka yang tidak pernah yaitu sebesar 72,9%.

Namun jika dilihat dari perilaku toleransi internal, mereka cenderung intoleran. Mereka yang berlatar belakang pesantren (73,9%) justru lebih intoleran daripada yang tidak pernah belajar di pesantren (63,9%). Jika dilihat dari persentase tersebut, perilaku intoleransi internal guru/dosen sangat tinggi. Kondisi tersebut berbahaya terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa di kelas di mana para guru/dosen PAI tersebut sejatinya adalah aktor yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan pemahaman siswa dan mahasiswa.

Tabel 3. Level radikalisme dan intoleransi pada kategori demografi latar belakang pesantren

		Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>
LATAR PENDIDIKAN PESANTREN		TEOP (%)				TEAC (%)			
Guru/Dosen	Pesantren	28.2	25.3	46.6	0.517	25.5	14.6	60.1	0.609
	Non-Pesantren	30.6	25.7	43.8		23	13.9	63.2	
		TIOP (%)				TIAC (%)			
Guru/Dosen	Pesantren	32.4	11.2	56.7	0.234	73.9	14.6	11.8	0.084
	Non-Pesantren	36.1	13.2	50.7		63.9	12.5	23.6	

		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
RADOP				
Guru/Dosen <i>p=0,579</i>	Pesantren	20	26.4	53.3
	Non-Pesantren	26.3	22.2	51.4
RADAC				
Guru/Dosen <i>p=0,3014</i>	Pesantren	6.5	18	75.3
	Non-Pesantren	10.4	16.7	72.9

Induk Kementerian. Dilihat dari induk kementerian di mana guru dan dosen bernaung, mereka yang di bawah Kemenag lebih moderat (57,6%) daripada mereka yang di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti (50,6%). Begitu pun jika dilihat dari level tindakan, mereka yang di bawah Kemenag mempunyai perilaku keagamaan moderat sebesar 75,3%, lebih tinggi sedikit dari mereka yang di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti sebanyak 73,8%. Fakta ini menjadi potensi bagi kedua Induk Kementerian untuk memperhatikan potensi guru agama Islam sebagai aktor yang penting dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah dan universitas.

Selanjutnya, pada level sikap toleransi eksternal, guru/dosen di bawah ketiga kementerian cenderung toleran. Mereka yang di bawah Kemenag justru yang lebih intoleran sebanyak 32,9% dibandingkan dengan mereka yang di bawah induk kementerian lainnya sebesar 27,8%. Pada sikap toleransi internal, menunjukkan pola yang sama. Guru/dosen di bawah Kemenag (45,6%) justru lebih intoleran dibanding mereka yang berada di bawah kementerian lain (29,5%). Begitu pun jika dilihat dari sisi toleransinya, guru/dosen di

bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti (59,9%) jauh lebih toleran daripada yang berada di bawah Kemenag (37,6).

Untuk level perilaku toleransi eksternal, tampak di ketiga induk kementerian cenderung memiliki perilaku yang toleran, dan mereka yang di bawah Kemenag cenderung lebih toleran. 63,5% mereka yang di bawah Kemenag lebih berperilaku toleran terhadap agama lain, sedangkan sebanyak 60,7% untuk mereka yang di bawah induk kementerian lainnya. Terakhir pada level perilaku toleransi di dalam internal umat Islam. Guru/dosen di ketiga kementerian cenderung memiliki perilaku keagamaan yang intoleran. Mereka yang berada di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti (71,3%) lebih intoleran daripada guru yang di bawah Kemenag (63,4%). menyimpang di dalam internal umat Islam.

Tabel 4. Level radikalisme dan intoleransi pada kategori demografi induk kementerian

INDUK KEMENTERIAN		Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>
		TEOP (%)				TEAC (%)			
Guru/Dosen	Kemenag	32.9	27.1	40	0.815	22.5	14.1	63.5	0.897
	Kemendikbud	27.8	24.9	47.3		24.9	14.3	60.7	
		TIOP (%)				TIAC (%)			
Guru/Dosen	Kemenag	45.6	16.5	37.6	0.005	63.4	20	16.5	0.130
	Kemendikbud	29.5	10.5	59.9		71.3	11.4	17.3	

		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
<i>RADOP</i>				
Guru/Dosen <i>p=0,660</i>	Kemenag	17.8	24.7	57.6
	Kemendikbud	24.9	24.5	50.6
<i>RADAC</i>				
Guru/Dosen <i>p=0,951</i>	Kemenag	7.9	16.5	75.3
	Kemendikbud	8.5	17.7	73.8

KEDEKATAN DENGAN ORMAS KEAGAMAAN

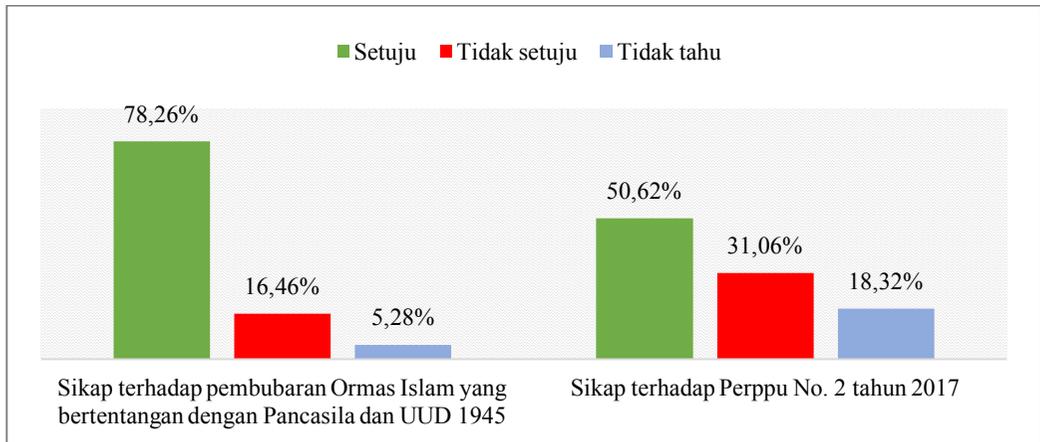
Dukungan terhadap pembubaran HTI. Salah satu isu penting yang mempengaruhi kondisi sosial keagamaan masyarakat Indonesia adalah diterbitkannya Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Melalui regulasi ini, pemerintah dapat membubarkan semua ormas yang bertentangan dengan ideologi dan dasar negara –Pancasila, UUD

1945, dan NKRI, termasuk ormas Islam. Buntutnya, melalui Perpu ini salah satu ormas Islam yaitu HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah. Pertanyaan penting adalah bagaimana sikap guru/dosen terhadap pembubaran ormas Islam yang dianggap bertentangan dengan dasar dan ideologi negara?

Hasil survei ini memperlihatkan sebanyak 78.26% guru/dosen setuju terhadap pembubaran ormas Islam yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan mereka yang tidak setuju sebanyak 16.46%, sisanya (5.28%) menyatakan tidak tahu. Secara spesifik terkait Perpu No. 2 tahun 2017, diperoleh 50.62% guru/dosen setuju dengan Perpu tersebut. 31.06% menyatakan tidak setuju dan 18.32% tidak tahu.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru/dosen setuju terhadap pembubaran ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Lebih jauh juga dibuktikan dengan tingginya dukungan terhadap Perpu No. 2 tahun 2017.

Gambar 8. Sikap terhadap pembubaran Ormas Islam dan Perpu Ormas No.2 Tahun 2017

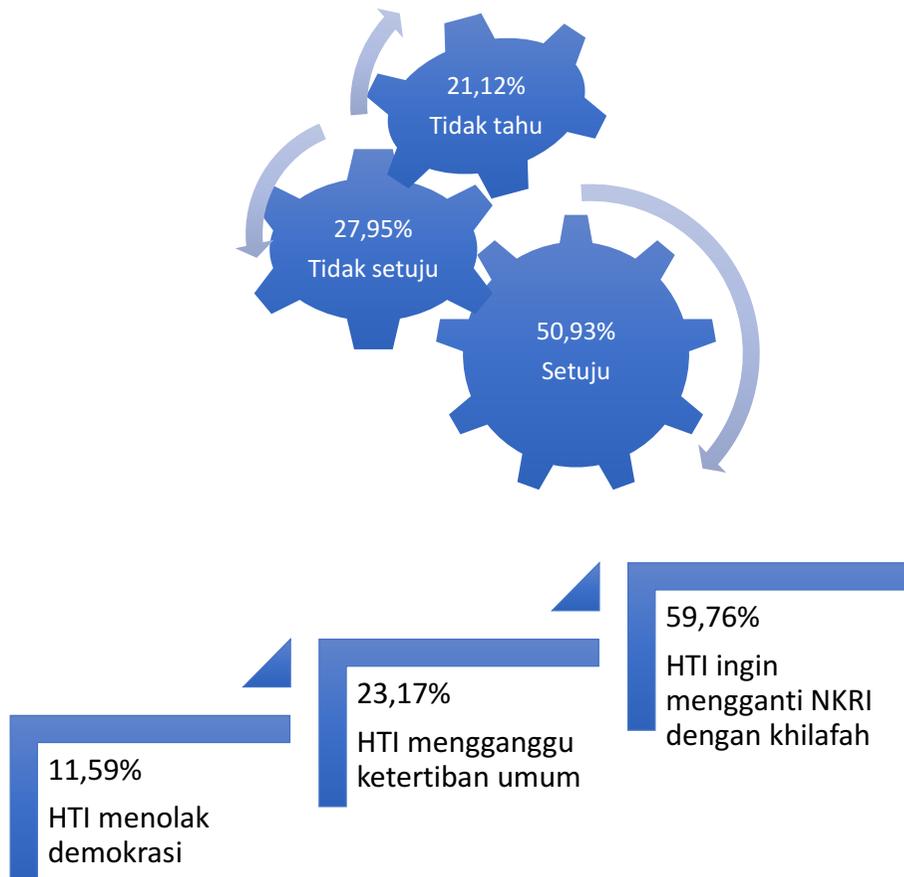


Survei ini juga menanyakan tentang sikap guru/dosen terhadap pembubaran HTI. Hasil survei memperlihatkan kecenderungan dukungan terhadap pembubaran HTI. Sebanyak 50.93% guru/dosen setuju jika HTI dibubarkan. 27.95% guru/dosen tidak setuju dan 21.12% tidak tahu.

Survei ini juga menanyakan lebih jauh alasan mengapa mereka mendukung pembubaran HTI. Sebagian besar beralasan karena HTI

ingin mengganti NKRI menjadi Khilafah (59,76%); mengganggu ketertiban umum (23,17%); dan HTI menolak demokrasi (11,59%).

Gambar 9. Dukungan dan alasan terhadap pembubaran HTI



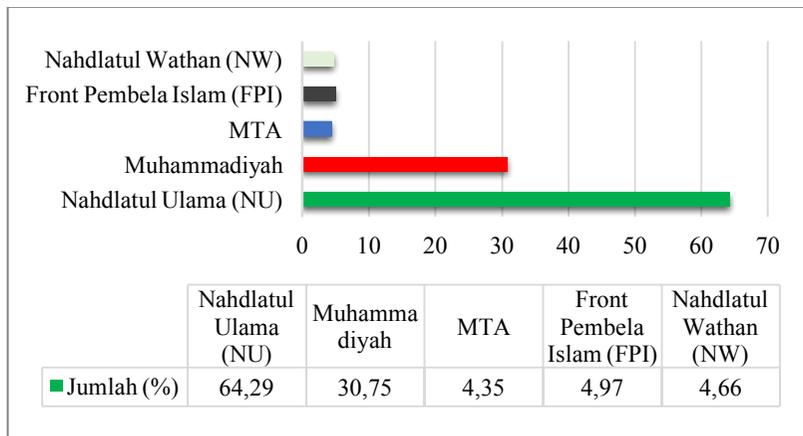
Alasan mereka tersebut mempunyai hubungan kuat terhadap tingkat radikalisme dan intoleransi. Guru/dosen yang setuju dengan pembubaran HTI memiliki pandangan (64,3%) dan perilaku (73,8%) keberagamaan cenderung moderat. Sedangkan mereka yang tidak setuju cenderung memiliki sikap (34,4%) dan perilaku (64,4%) keberagamaan yang radikal.

Tabel 5. Sikap terhadap pembubaran HTI dengan tingkat radikalisme dan intoleransi

SIKAP TERHADAP PEMBUBARAN HTI	RADOP (%)				RADAC (%)			
	Radikal	Netral	Moderat	P-Value	Radikal	Netral	Moderat	P-Value
Setuju	17.7	18.9	64.3	0.02	6.1	20.1	73.8	0.33
Tidak Setuju	34.4	32.2	33.3	0.02	14.4	21.1	64.4	0.33
Tidak Tahu	20.6	27.9	51.5	0.02	5.9	5.9	88.2	0.33

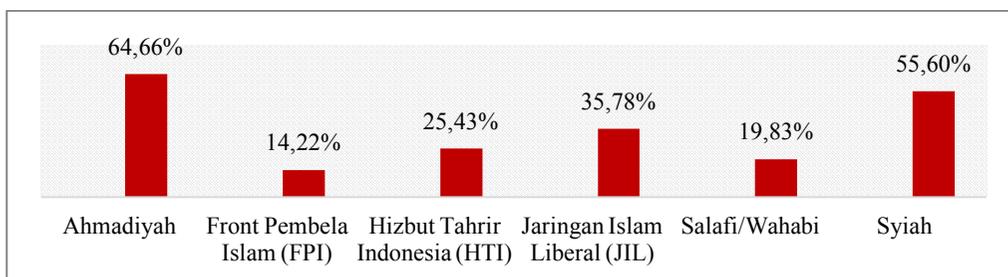
Ormas Islam pilihan. Hasil survei memperlihatkan 5 ormas Islam yang paling dekat dengan guru/dosen di 34 provinsi. Ke lima ormas tersebut yaitu, NU; Muhammadiyah; FPI; MTA dan LDII. Mayoritas guru/dosen menilai NU (64,29%) dan Muhammadiyah (30,75%) menjadi ormas Islam yang memiliki kedekatan dengan mereka. Disusul HTI sebesar sebanyak 4,97%, kemudian Nahdlatul Wathan 4,66%, dan terakhir Majelis Tafsir Al-Qur'an sebanyak 4,35%.

Gambar 10. Ormas Islam pilihan guru dan dosen



Ormas Islam yang Tidak Disukai. Berikut adalah enam ormas yang tidak disukai oleh guru/dosen berdasarkan. Mereka memilih Ahmadiyah sebagai peringkat pertama sebagai organisasi Islam yang mereka paling tidak sukai (64,66%). Peringkat kedua adalah Syi'ah (55.60%); JIL, 35.78%; HTI, 25.43; Salafi/Wahabi, 19.83 dan terakhir FPI, 14.22%.

Gambar 11. Organisasi Islam yang tidak disukai

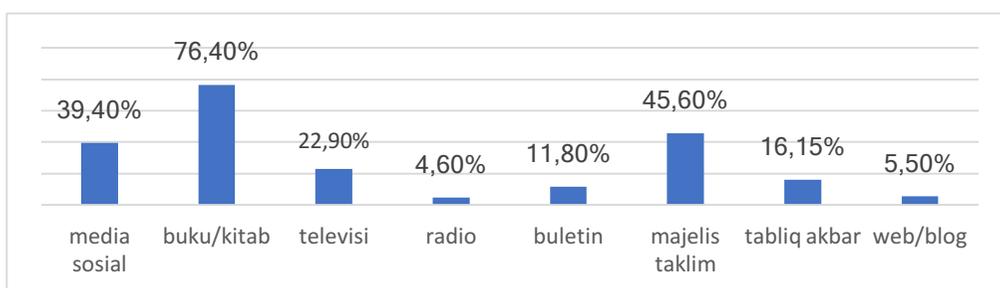


SUMBER PENGETAHUAN AGAMA

Survei ini juga mengkaji sumber pengetahuan agama yang menjadi rujukan guru dan dosen PAI. Apakah perkembangan teknologi informasi mempengaruhi mereka dalam memperoleh pengetahuan agama? Atau mereka tetap memilih sarana-sarana tradisional, seperti baca kitab atau datang ke majelis taklim, dalam memperoleh pengetahuan agama.

Temuan survei ini menunjukkan bahwa internet dan media sosial bukanlah sebagai rujukan utama bagi guru dan dosen dalam menambah pengetahuan agama. Mereka masih tetap konsisten menggunakan buku/kitab sebagai sumber pengetahuan agama (76.4%). Selanjutnya, pengajian rutin di majelis taklim sebagai sumber pengetahuan agama kedua setelah buku/kitab (45.6%). Hanya 39.4% mereka yang menggunakan media sosial sebagai sumber pengetahuan agama. Selanjutnya adalah televisi sebesar 22.9%, kemudian tablig akbar (16,15%), dan stasiun radio (4.6%).

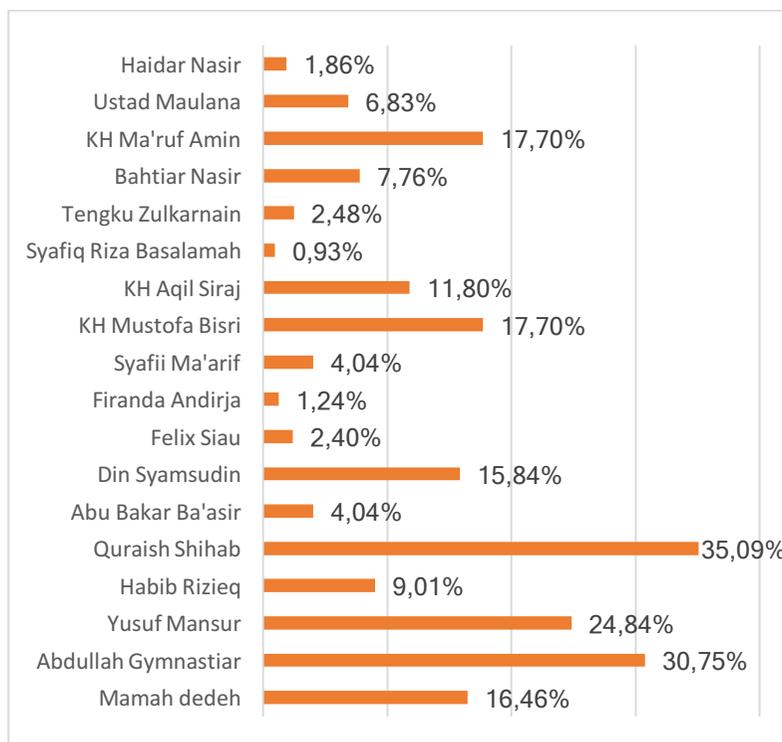
Gambar 12. Sumber pengetahuan agama guru dan dosen



Selain menanyakan media yang menjadi sumber rujukan utama bagi guru/dosen mencari pengetahuan agama, survei ini menanyakan ustadz/ulama yang menjadi panutan mereka. Tokoh yang paling menjadi panutan guru/dosen Quraish Shihab. Disusul yang paling menjadi panutan secara berturut-turut adalah Abdullah Gymnastiar (30,75%), Yusuf Mansur (24,84%), Ma'ruf Amin dan Mustofa Bisri yang sama-sama memperoleh (17,70%), dan Mamah Dedeh (16,46%). Tokoh-tokoh tersebut dapat dikatakan sebagai termasuk tokoh-tokoh yang dapat dimasukkan dalam kategori moderat dan berasal dari ormas *Islam mainstream*.

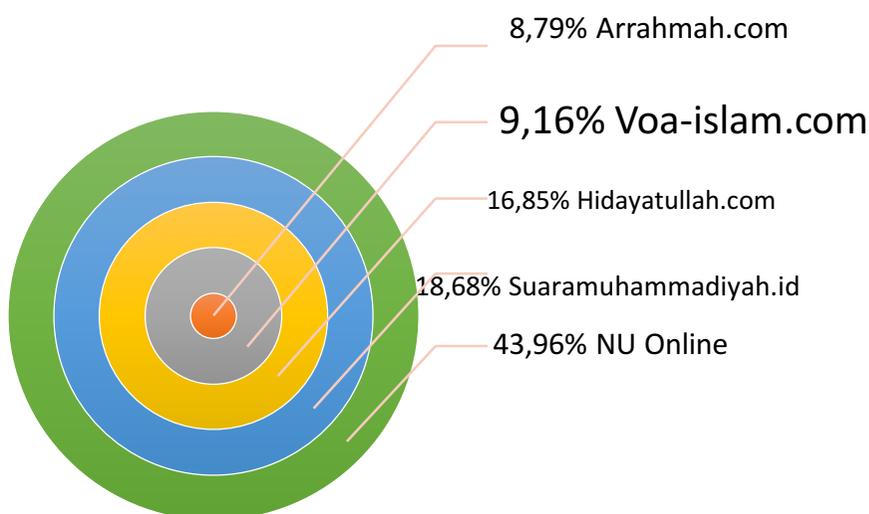
Sedangkan tokoh-tokoh yang dinilai masuk dalam kategori radikal dan dalam ceramahnya kerap menjustifikasi cara-cara kekerasan tampak tidak begitu populer di kalangan guru/dosen. Tokoh seperti Habib Rizieq Shihab hanya mendapat 9,01% dan Abu Bakar Ba'asir memperoleh 4,04%. Begitu pun tokoh gerakan Salafi, Syafiq Riza Basalamah, hanya memperoleh 0,93%.

Gambar 13. Tokoh agama yang menjadi panutan



Temuan survei juga menunjukkan bahwa situs organisasi Islam yang paling banyak diakses oleh guru dan dosen adalah situs dari organisasi Islam *mainstream*. Namun, situs-situs dari kalangan kelompok radikal, walaupun tidak sepopuler situs-situs kelompok mainstream, tetap menjadi rujukan guru dan dosen dalam memperoleh pengetahuan agama. Situs-situs agama Islam yang paling banyak diakses oleh guru/dosen adalah NU online. Sekitar 43.96% guru/dosen mengakses situs NU online sebagai sumber informasi persoalan keagamaan. Suaramuhammadiyah.id 18.68%, arrahmah.com 8.79%, eramuslim.com 10.26%, hidayatullah.com 16.85%, nahimungkar 2.20%, panjimas.com 1.47%, salafy.or.id 2.93%, voa-islam.com 9.16%.

Gambar 14. Situs Islam yang paling banyak diakses



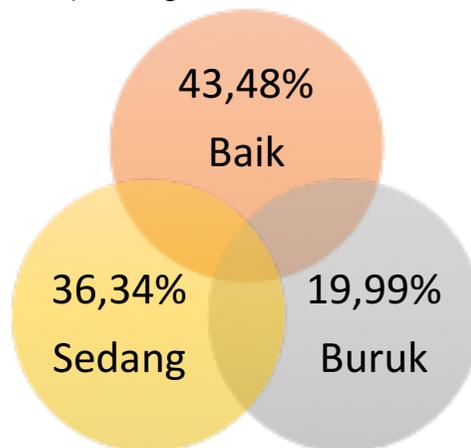
PERSEPSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

Sejumlah kondisi struktural dapat memfasilitasi seseorang bertindak atau bergabung dengan organisasi ekstremis. Salah satunya adalah perasaan menjadi korban ketidakadilan atas situasi deprivasi sosial dan ekonomi yang mereka alami. Selain itu rendahnya performa pemerintah juga dapat menjembatani bagi sejumlah orang memilih bersikap dan berperilaku radikal. Sejumlah aksi kekerasan dan teror terjadi di banyak negara yang masuk kategori sebagai negara

gagal (*failed state*), terutama di negara-negara belahan Afrika dan Arab, di mana negara gagal dalam pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan kebijakan publik lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, mengetahui persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah menjadi penting. Masalah serius bila mayoritas Muslim memiliki persepsi tidak atau kurang terwakili dalam kebijakan pemerintah. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan teralienasi. Dalam studi budaya politik (*civic culture*) kondisi seperti ini ditemukan dalam negara yang kurang atau tidak demokratis, di mana negara tidak memberikan ruang yang bebas bagi partisipasi publik.

Gambar 15. Persepsi terhadap kebijakan pemerintah terkait kepentingan umat Islam



Survei ini memperlihatkan bahwa secara umum mayoritas guru dan dosen menilai kebijakan pemerintah terkait kepentingan umat Islam cenderung positif. Kurang dari 20% menyatakan buruk, dan sebanyak 36,34% merasa sedang. Temuan ini memberikan optimisme bahwa umat Islam cenderung menganggap dirinya bagian penting dari kebijakan pemerintah, serta tidak teralienasi dari program-program pemerintah.

Secara teoritis, persepsi yang menunjukkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah akan berdampak semakin tingginya tingkat budaya kewargaan, dan jika sebaliknya akan mengancam

demokrasi.⁸ Masyarakat yang percaya bahwa aspirasi mereka didengar akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah. Kondisi ini akan mendorong warga untuk semakin aktif berpartisipasi dan melibatkan diri dalam berbagai pembuatan kebijakan.

Temuan survei menunjukkan, sebagian besar guru dan dosen responden menilai negatif pelaksanaan penegakkan hukum. Sekitar 81,12% menyatakan penegakkan hukum masih tidak adil, hanya 19,88% yang menyatakan penegakan hukum telah dilaksanakan dengan adil. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena semakin banyak orang yang merasa penegakkan hukum berlaku tidak adil terhadap mereka, kondisi di mana mereka merasa dizalimi, maka akan semakin memotivasi mereka untuk melakukan solusi-solusi yang bersifat ekstrim dan radikal.

Sejalan dengan penegakan hukum, temuan serupa terjadi pada penilaian terhadap kondisi ekonomi. Mayoritas guru/dosen menilai kondisi ekonomi nasional masih buruk (66.47%). Hanya 33.54% yang menganggap kondisi ekonomi saat ini baik. Lebih jauh, terkait hal kesenjangan ekonomi, data juga menunjukkan tren yang sama. Mereka menilai kesenjangan ekonomi saat ini sudah dalam keadaan yang buruk (44.41%).

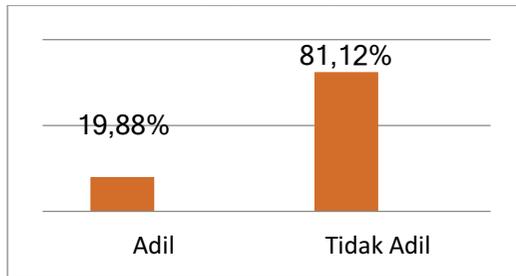
Sejatinya ada keterkaitan antara persepsi ketidakadilan ekonomi dengan potensi radikalisme dan terorisme.⁹ Selain itu, rendahnya performa pemerintah turut memberi kontribusi bagi lahirnya radikalisme dan terorisme.¹⁰ Perasaan diberlakukan tidak adil ini merupakan faktor pendorong (*push*) bagi keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak kekerasan. Sedangkan ideologi menjadi faktor penarik (*pull*).

⁸ Lihat Gabriel Almond and Sidney Verba (1963). "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations." Princeton: Princeton University Press.

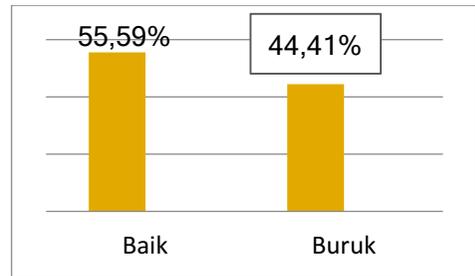
⁹ Lihat Ted Robert Gurr. "Economic Factors" dalam, Louis Richardson (2006). "The Roots of Terrorism." London and New York: Routledge.

¹⁰ Lihat Alan B. Krueger (2007) "What Makes a Terrorist: Economic and the Roots of Terrorism." Princeton: Princeton University Press.

Gambar 16. Persepsi terhadap penegakan hukum di Indonesia



Gambar 17. Persepsi tentang kesenjangan ekonomi

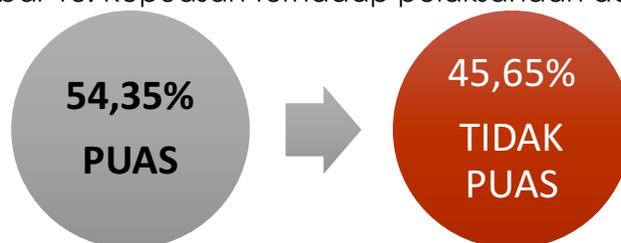


KEPUASAN TERHADAP DEMOKRASI

Penilaian yang cenderung negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan kondisi ekonomi tidak sejalan dengan penilaian terhadap demokrasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pandangan guru dan dosen terhadap demokrasi justru sangat positif. 88.82% menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik, dan sebanyak 10.18% menganggap demokrasi sebagai sistem yang buruk. Dukungan lebih 70% kepada demokrasi menunjukkan indikator stabilitas demokrasi yang sudah mantap.¹¹

Kemudian bagaimana kepuasan mereka terhadap pelaksanaan demokrasi? Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan dosen puas dengan pelaksanaan demokrasi (54,35%). Namun jumlah tersebut masih jauh di bawah tingkat dukungan mereka terhadap demokrasi. Mereka yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi juga cukup tinggi, yaitu sebesar 45,65%.

Gambar 18. Kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi



¹¹ Lihat Larry Diamond (1999). "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

ISLAMISME

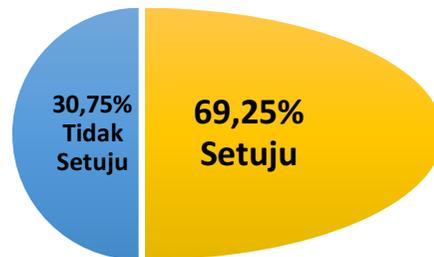
Salah satu yang menonjol di era reformasi demokrasi hingga saat ini adalah menguatnya identitas Islam. Sejumlah kecenderungan menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap agenda-agenda politik yang bernuansa Islamisme. Salah satunya yang paling menonjol adalah dukungan terhadap implementasi syariat Islam dalam regulasi negara.

Ekspresi lain dari menguatnya identitas Islam adalah meningkatnya aktivisme kelompok-kelompok intoleran yang memperjuangkan bentuk sistem kenegaraan lain di luar NKRI. Salah satu kelompok Islamis yang gencar menyebarkan konsep khilafah sebagai alternatif lain dari NKRI adalah HTI. Aktivisme mereka salah satu sasaran utamanya adalah generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa.

Dukungan terhadap Penerapan Syariat Islam. Dukungan bagi pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam cenderung sangat tinggi di kalangan guru dan dosen (69,25%). Dukungan bagi pemerintah menerapkan syariat Islam harus dilihat lebih jauh menyangkut apa yang dipahami mereka tentang syariat Islam itu sendiri, dan sejauh mana keterlibatan pemerintah di dalamnya. Dukungan terhadap penerapan syariat Islam oleh pemerintah sejatinya tidak lepas dari pergeseran perilaku dan gaya hidup masyarakat Islam yang meningkat ketertarikannya kepada hal-hal yang bernuansa Islam, seperti busana muslim, makanan halal, pengobatan yang Islami, perekonomian Islam, dan sejumlah aspek kehidupan sosial lainnya.

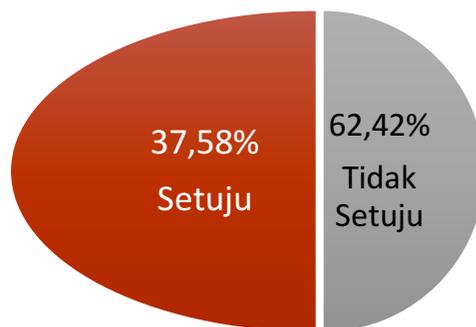
Dalam konteks Indonesia, perkembangan gerakan Islamisme yang makin gencar setelah reformasi tahun 1998. Perjuangan yang mendorong formalisasi syariat Islam ini dilakukan melalui pembuatan regulasi syariah. Kesempatan memformalkan syariat Islam itu sangat terbuka sejalan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah sejak 2001.

Gambar 19. Dukungan terhadap penerapan syariat Islam oleh pemerintah



Dukungan terhadap Khilafah. Temuan survei ini memperlihatkan bahwa guru dan dosen cenderung tidak menyetujui jika khalifah merupakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam. 62,42% menyatakan tidak setuju jika sistem khilafah merupakan bentuk pemerintahan yang sesuai Islam. Namun, temuan ini cukup mengkhawatirkan sebab mereka yang setuju bahwa khilafah sesuai dengan Islam mencapai 37,58%. Jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil, mengingat peran mereka sebagai guru dan dosen PAI yang salah satunya adalah turut memperkuat aspek-aspek wawasan kebangsaan.

Gambar 20. Persepsi bahwa sistem khilafah adalah sistem pemerintahan Islam

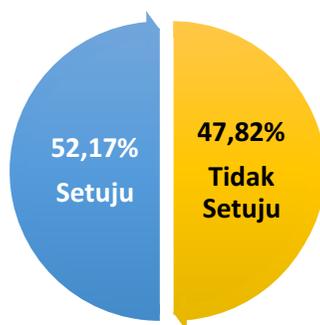


Tema Islamisme lainnya selain khilafah adalah penerapan syariat Islam yang mengemuka setelah reformasi. Penerapan syariat Islam diawali di Provinsi Aceh melalui UU No. 18 Tahun 2001 yang memberi

kewenangan Aceh menerapkan hukum Islam. Setelah itu, muncul regulasi-regulasi bernuansa agama di beberapa daerah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan survei bahwa dukungan guru dan dosen terhadap penerapan syariat Islam sangat tinggi (91,23%).

Isu mengenai hukum cambuk bagi pelaku zina dapat menggambarkan pandangan guru dan dosen terhadap penerapan syariat Islam. Sebanyak 52,17% setuju dengan hukum cambuk itu yang dipersepsi sebagai pelaksanaan hukum Islam. Dari realitas ini, perlu pemerintah memberikan penguatan wawasan kepada para guru dan dosen PAI tentang penafsiran yang lebih fleksibel dan substantif terhadap hukum Islam, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural.

Gambar. 21 Persepsi bahwa hukum Islam bagi pelaku zina adalah cambuk



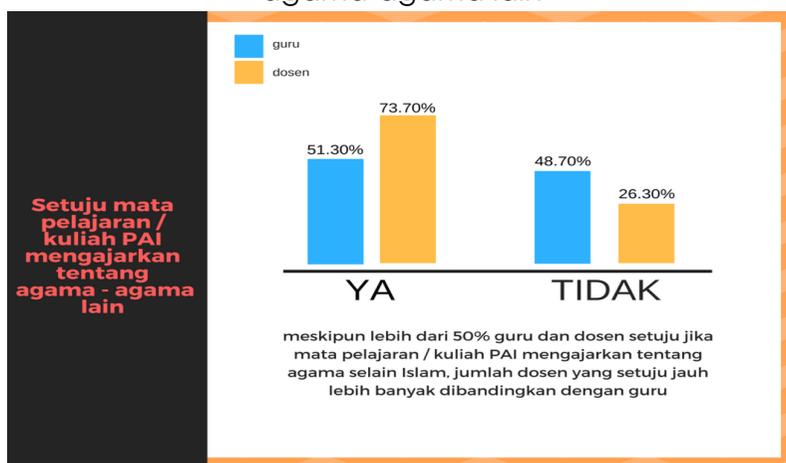
MENG-COUNTER INTOLERANSI DAN RADIKALISME

Materi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam seharusnya menjadi sarana menciptakan siswa dan mahasiswa yang toleran dan moderat. Untuk itu, seyogianya materi-materi dalam pembelajaran PAI memuat narasi yang kuat dalam menumbuhkan sikap toleran dan moderat tersebut. Survei ini melihat apakah kurikulum PAI mendukung timbulnya sikap dan aksi toleran. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa materi PAI selama ini belum memberikan ruang yang cukup untuk membuat siswa dan mahasiswa memiliki sikap dan aksi toleran. Materi PAI yang terdapat dalam Kurikulum 2013 dianggap oleh guru lebih banyak penekanan pada aspek keimanan, ketaqwaan, dan ibadah.

Dengan kondisi seperti itu, penting untuk melihat persepsi guru dan terkait isu-isu toleransi dan radikalisme. Dari sana kemudian dapat lebih jernih dilihat peluang untuk mengembangkan PAI yang dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Hasil survei menunjukkan mayoritas guru dan dosen memandang bahwa PAI hendaknya bertujuan untuk mendukung tumbuhnya jiwa nasionalisme (81,68%) –menumbuhkan komitmen kepada siswa dan mahasiswa untuk komitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Mereka juga cenderung sangat setuju jika tujuan PAI adalah memperkuat pemahaman tentang kesetaraan gender (50,31%). Namun, mereka merasa sangat tidak setuju jika tujuan PAI adalah membentuk siswa yang toleran terhadap pemeluk Syiah (50%) dan Ahmadiyah (49,07%).

Namun demikian masih ada peluang untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai toleransi di dalam materi pelajaran PAI. Hasil survei ini memperlihatkan mayoritas guru dan dosen PAI setuju jika di dalam pembelajaran PAI juga mengajarkan agama-agama lain. Data menunjukkan sebesar 51,30% guru dan 73,70% dosen setuju jika PAI mengajarkan tentang agama selain Islam. Dengan demikian terbuka lebar bagi pemerintah untuk mengenalkan materi tentang ajaran agama lain dalam pembelajaran PAI kepada para guru dan dosen. Dengan mengetahui ajaran agama lain, mereka dapat menumbuhkan dan memperkuat sikap toleran dan moderat para siswa dan mahasiswa.

Gambar 22. Dukungan terhadap PAI untuk mengajarkan tentang agama-agama lain



KESIMPULAN

Temuan survei ini, dalam kasus-kasus tertentu, memperlihatkan bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjangkiti alam pikiran dan perilaku guru dan dosen PAI. Stigma negatif mereka terhadap Syiah dan Ahmadiyah merupakan salah satu bentuk intoleransi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus pemerintah karena bisa mengancam keragaman Indonesia. Terlebih saat ini ada kecenderungan meningkatnya konservatisme agama dan gelombang ideologi radikal, baik lokal maupun transnasional.

Namun demikian, temuan survei memperlihatkan bahwa dukungan guru dan dosen terhadap NKRI dan demokrasi sangat tinggi. Kondisi ini hendaknya dijadikan peluang bagi negara untuk menjadikan mereka sebagai agen yang dapat membuat dan memperkuat nilai-nilai toleransi dan wawasan kebangsaan generasi muda Indonesia. Terlebih temuan survei juga menunjukkan bahwa mereka setuju jika dalam pembelajaran PAI memuat materi tentang ajaran agama-agama lain. Fakta tersebut merupakan peluang untuk dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran PAI. Hal itu penting dilakukan untuk tetap memastikan Indonesia sebagai negara yang toleran dan damai.

PROFIL PENULIS

Rangga Eka Saputra adalah peneliti muda Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ilmu Politik pada tahun 2014. Sebelum bergabung di PPIM UIN Jakarta, Rangga pernah menjadi peserta program *internship* di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina pada 2014. Pada tahun 2017, Dia dipilih untuk mengikuti *Certificate Training Program "Religion and the Rule of Law in Indonesia and Southeast Asia"* yang diselenggarakan oleh kerja sama Leimena Institute, Internasional Global Engagement (IGE), dan Brigham Young University. Di PPIM, Rangga telah terlibat dalam beberapa penelitian terkait pendidikan agama seperti: *Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI (2016)* dan *Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia (2016)*.

PROFIL LEMBAGA

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program *Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia*, sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebhinnekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal ***Studia Islamika***, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, Scott R. (1999). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner (2010). "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia" dalam Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman (edt.) "Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education". Princeton: Princeton University Press.
- Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI).
- Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (2000). "Teacher education – A question of teacher knowledge" Dalam A. Scott & J. Freeman-Moir (Eds), *Tomorrow's teachers: International and critical perspectives on teacher education* (pp. 89–105). Christ Church, New Zealand: Canterbury Press.
- Diamond, Larry (1999). "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Gurr, Ted Robert. "Economic Factors" dalam, Louis Richardson (2006). "The Roots of Terrorism." London and New York: Routledge.
- Hefner, Robert W (2000). "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia." Princeton: Princeton University Press.
- Krueger, Alan B. (2007) "What Makes a Terrorist: Economic and the Roots of Terrorism." Princeton: Princeton University Press.
- Liddle, R. William (edt.) (2011). "Crafting Indonesian Democracy: Internasional Conference Toward Structural Reforms for Democratization Indonesia." Jakarta: Penerbit Mizan.
- Maarif Institute, (2018). "Menjaga Benteng Kebhinekaan di sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon". Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.

- Mubarak, M. Zaki (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.
- Mujani, Saiful (2007). "Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah." Laporan Hasil Penelitian
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." Laporan Hasil Penelitian.
- Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.
- Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri." Laporan Hasil Penelitian.